

MELAMPAUI KEPEMIMPINAN MACHIAVELLIAN: MEMBANGUN MODEL PEMIMPIN IDEAL DALAM NEGARA DEMOKRASI

Beato Adolph Kolping Teda¹, Hironimus Raldi Bot², Januario Armando Bin³, Efraim Yudistira Niron⁴

Abstrak: Indonesia merupakan sebuah negara yang tercatat belum menjalankan sistem pemerintahan demokrasi secara baik. Praktik politik di Indonesia terutama menjelang pemilu di tahun 2024 terkesan sudah melecehkan kesakralan demokrasi karena mempraktikkan model kepemimpinan machiavellian. Kepemimpinan machiavellian sendiri dapat dipahami sebagai model kepemimpinan yang hanya berfokus pada eksistensi diri seorang pemimpin sementara hak kebebasan rakyat dan hukum dinomorduakan bahkan pada kondisi tertentu bisa dikorbankan agar dirinya tetap eksis. Di sini nampak nilai-nilai etis diabaikan begitu saja demi mempertegas eksistensinya sebagai penguasa. Akibatnya, rakyat yang semestinya mendapat tempat yang tinggi dalam negara justru diabaikan. Pemimpin belum menunjukkan kualitas dirinya secara baik di hadapan rakyat yang demokratis. Terhadap persoalan tersebut, penulis ingin mengkaji seperti apa model pemimpin ideal berbasis etika dan moralitas dalam negara demokrasi agar tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Hasil kajian menunjukkan bahwa model pemimpin ideal dalam negara demokrasi adalah mereka yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap agama dan budaya sebagai sumber nilai-nilai etis dan moralitas. Agama dan budaya diyakini dapat mempengaruhi tindakan seorang pemimpin dalam membuat kebijakan dan putusan demi kepentingan bersama. Karena itu, kehidupan bernegara perlu diselaraskan dengan kehidupan beragama.

Kata Kunci: Demokrasi, Machiavellian, Etika, Pemimpin Ideal.

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi di Indonesia baru saja berakhir. Namun remah-remah persoalan yang terjadi sejak pra pemilu masih mewarnai situasi politik pasca pemilu. Hiruk pikuk politik telah berganti topik tentang rezim penguasa yang mempraktikkan demokrasi represif dan cenderung bercorak otoriter. Serangkaian kejadian politik berupa kebijakan penguasa seperti perubahan undang-undang telah berdampak pada pertengkaran dan perdebatan yang tak karuan antar sesama warga masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perhelatan antar calon baik calon anggota legislatif maupun capres dan cawapres menjelang pemilu di tahun 2024 mendapat begitu banyak kritikan.

Kontestasi antar calon dianggap tidak sehat karena mencedraai nilai-nilai etis dan moral. Hal ini nampak dalam fenomena pencalonan Gibrab Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menemani calon presiden Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang notabene sebagai putra presiden (Joko Widodo) dan ponakan kandung ketua Makama Konstitusi (Anwar Usman) dapat dengan mudah digiring ke dalam pertarungan memperebutkan jabatan sebagai capres dan cawapres di ajang pemilu 2024 meskipun usianya belum memenuhi syarat hukum. Penilaian para civil society maupun para akademisi cenderung negatif. Praktik politik demikian dinilai sebagai praktik politik dinasti yang mustahil terjadi di negara demokrasi tetapi toh terjadi juga. W. S. Rendra menyebutkan bahwa demokrasi kita sedang sakit dan lonceng kehancurannya sedang menggema.

Hukum dipakai sebagai instrumen untuk melegitimasi putusan penguasa yang terkesan menyimpang dan sewenang-wenang. Tirani politik yang telah terkonstruksi dalam diri penguasa diakui secara rasional oleh hukum sementara aspek etika dan moralitas diabaikan begitu saja. Negara Indonesia yang notabene bercorak demokratis sekejap berubah menjadi jenis negara tirani di mana penguasa bertindak sewenang-

wenang terhadap hukum maupun masyarakat. Etika politik diabaikan sementara kehausan kekuasaan dilanggengkan. Opini publik yang termuat dalam majalah Tempo mengatakan bahwa Jokowi telah menodai kesakralan demokrasi. Alih-alih boleh menjaga netralitas pemerinta, sementara ia sendiri menyampaikan bahwa pemerintah, termasuk dirinya, boleh berkampanye dan memihak pada salah satu kandidat. Ketidaknetralan Jokowi kemudian didukung oleh pembantu-pembantunya dari tiga kubu calon presiden yang memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye.

Lebih jauh, praktik politik yang dibuat Jokowi bersama Anwar Usman untuk melanggengkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam ajang pemilu kali ini dianggap masyarakat sebagai praktik nepotisme yang keji. Bisa jadi masih ada praktik korupsi dan kolusi yang terselubung yang dilakukan oleh presiden bersama kelompoknya. Hal ini bisa menjadi suatu kepastian bila melihat sepak terjang para pemimpin bangsa ini seperti Gus Dur dan Megawati. Gus Dur seorang presiden yang dianggap baik dan pada masa awal kepemimpinannya begitu lantang melabrak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Tetapi, pada akhirnya beliau dijatuhkan juga karena dugaan skandal KKN. Begitupun Megawati Soekarno Putri. Ia yang begitu lantang melabrak skandal KKN dan memeranginya secara tegas, perlahan perlawanan itu melemah dan bahkan tidak terdengar lagi gemanya. Sejak saat itu, KKN dianggap tidak akan pernah minggat dari Indonesia sekalipun bangsa ini dipimpin oleh seorang malaikat.

Situasi politik di Indonesia saat ini memperlihatkan bahwa tujuan politik dinomorsatukan sementara proses diabaikan. Tidak penting proses yang dibuat baik atau buruk yang penting tujuan yang mau digapai dapat terealisasi secara sempurna. Aspek etis moral diabaikan dalam prosesnya demi mencapai tujuan yang menurut penguasa baik untuk dirinya maupun kelompoknya.

Model kekuasaan seperti ini tidak jauh berbeda dengan apa yang digagas oleh seorang filsuf modern Niccolo Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* (Pangeran). Machievelli berpendapat bahwa seorang pemimpin negara yang sukses adalah dia yang secara sadar mengorbankan hukum dan masyarakatnya demi mempertahankan eksistensi negara. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai sebuah negara yang otonom, pemerintah maupun seluruh elemen yang ada di dalamnya harus mengorbankan apapun yang mereka punya termasuk hak dan kebebasan. Legitimasi kekuasaan dapat membenarkan segala teknik pemanipulasian dukungan rakyat terhadap kekuasaan yang ada. Dengan alasan tersebut, Machiaveli mengatakan bahwa wajah seorang penguasa tidak saja menampilkan kebersihan, kesucian, kemurnian, kesopanan, dan feminim, tetapi juga memperlihatkan wajah yang kotor, berdarah, dan garang layaknya seorang manusia yang ambisi.

Paham kepemimpinan model Machiavelli dianggap tidak tepat bila diaplikasikan dalam sebuah negara demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Meskipun demikian, konsep Machiavelli tentang model kepemimpinan tersebut telah mewarnai situasi negara Indonesia saat ini. Presiden Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden menemani Prabowo subianto sebagai calon presiden dalam perhelatan pemilu kali ini. Hukum dirubah dengan sekejap mata, nilai-nilai etis, kultural, dan religious diabaikan begitu saja demi tujuan yang belum terarah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini ingin menelaah seperti apa model pemimpin ideal berbasis etika dan moralitas dalam negara demokrasi dengan melihat situasi politik Indonesia sebagai tolak ukur apakah idealitas pemimpin itu sudah terwujud ataukah belum. Tinjauan ini dibuat dengan jalan mengeritik model kepemimpinan Machiavellian yang telah mewarnai sistem pemerintahan Indonesia. Kajian tersebut dibuat dengan menggunakan metode kepustakaan. Penulis membaca buku-buku sumber dari perpustakaan dan jurnal-jurnal cetak maupun online terkait tema yang dibahas. Adapun rumusan masalah yang dibuat antara lain sebagai berikut. Seperti apa model kepemimpinan yang ideal dalam sebuah negara demokrasi? Mengapa konsep machiavellian ditolak? Apa saja standard etis dalam negara demokrasi yang mesti dipenuhi seorang pemimpin agar idealitasnya terlihat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Niccolo Machiavelli adalah seorang filsuf pendobrak modernitas yang cukup terkenal dalam ilmu politik dan filsafat politik. Meskipun demikian, namanya sering dihubungkan dengan praktik-praktik kekuasaan yang busuk dan bahkan keji. Orang mengenalnya sebagai pribadi yang diktator, sewenang-wenang, dan cenderung mengabaikan aspek etis moral. Tidak heran jika ia dikutuk sebagai bajingan yang tak bermoral.

Bagi seorang yang moralis ketika membaca karya-karyanya akan memberi kesan bahwa Machiavelli adalah seorang yang tidak bermoral. Meskipun demikian, pemikiran-pemikirannya secara diam-diam atau bahkan secara terang-terangan menjadi praktik politik di beberapa negara termasuk Indonesia. Demokrasi hanya dilihat sebagai label negara ini sementara praktiknya ialah oligarki. Pemimpin negara seperti Joko Widodo telah memperlihatkan model kepemimpinan Machiavellian yang cenderung sewenang-wenang terhadap hukum dan masyarakat. Tindakan-tindakan baik diperlihatkan secara transparan sementara praktik-praktik keburukan diselubungi secara rapih sehingga tidak diketahui. Semua kebusukannya baru nampak menjelang akhir masa kepemimpinannya melalui upaya perombakan konstitusi negara dan praktik politik dinasti. Untuk melihat model kepemimpinan Machiavellian yang terjadi di Indonesia pertama-tama penulis ingin mengulas terlebih dahulu konsep kepemimpinan Machiavellian.

1. Konsep Kepemimpinan Model Machiavellian

Machiavellian ialah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan seorang politikus atau seorang pemimpin yang mempraktekkan tindakan-tindakan politik yang tidak bermoral. Istilah tersebut kemudian lebih berkonotasi negatif setelah aliran machiavellianisme menjadi populer di beberapa negara. Machiavillianisme merupakan sebuah gerakan politik yang menerapkan ajaran-ajaran Machiavelli yang mengedepankan upaya mencapai tujuan-tujuan politik dan mengorbankan aspek etika dan moralitas. Dengan demikian, dapat ditarik satu pemahaman bahwa machiavillian ialah sebuah tindakan politik tak bermoral sementara Machiavillianisme adalah sebuah paham atau aliran yang dipeluk oleh beberapa orang demi mendukung tindakan-tindakan politik anti moralitas. Dalam konsep Machiavillian, hanya ada dua bentuk negara yang paling penting yaitu republik dan monarki.

Sepintas mengenai sejarah lahirnya aliran machiavellianisme dalam tatanan perpolitikan. Orang-orang yang menganut paham machiavellianisme sebenarnya adalah mereka yang secara gamblang menafsirkan karya Machiavelli dalam *Il Principe* (Pangeran). Salah satu tafsiran yang paling dominan dan diterima sampai abad ke-19

ialah bahwa Machiavelli dalam filsafat politik ingin memisahkan kekuasaan dari moralitas. Tafsiran ini kemudian diperkuat dengan adanya pengakuan dari hirarki gereja Katolik sehingga 32 tahun setelah kematiannya tepatnya pada tahun 1559, bukunya dimasukkan dalam daftar indeks dan digolongkan sebagai buku yang dilarang untuk dibaca dan diedarkan dalam komunitas kekristenan karena dianggap bertentangan dengan filsafat politik yang resmi.

Paham Machiavellianisme mengatakan bahwa dalam sebuah negara elemen-elemen yang ada di dalamnya tidaklah lebih penting dari negara itu sendiri. Negara memiliki tujuan dalam dirinya sendiri yaitu mempertahankan eksistensinya. Mencapai tujuan tersebut maka warga negara dan semua instrument hukum di dalamnya harus berupaya sedemikian rupa sehingga eksistensi negara tersebut tetap diakui. Seorang pemimpin yang menganut model Machiavellianisme beranggapan bahwa dalam upaya pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kemauan rakyat. Apakah tindakan itu baik atau buruk di mata masyarakat bukan suatu persoalan yang mesti dipertimbangkan.

Demi tujuan di atas, masyarakat dan instrument hukum harus bisa rela dikorbankan dengan cara apapun. Dalam karyanya *Il Principe*, Machiavelli menegaskan bahwa demi kepentingan negara seorang penguasa boleh bertindak di luar hukum karena hukum itu dibuat oleh manusia atas desakan kebutuhan. Atas dasar ini maka hukum tidak bersifat mutlak. Ia harus mengikat rakyat demi kepentingan negara, tetapi hukum tidak pernah boleh membelenggu sang penguasa. Itulah terapi yang dianggap Machiavelli paling tepat dalam keadaan darurat. Lebih jauh, perhatiannya yang begitu luar biasa terhadap negara terlihat melalui beberapa ungkapan yang sering digunakannya, seperti “demi kelanjutan negara”, “demi keselamatan negara”, “untuk mempertahankan negara”, dan sebagainya.

Sekalipun Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara ialah negara itu sendiri, namun beberapa serjana yang menafsirkan karya-karyanya mengatakan bahwa Machiavelli tidak pernah secara jelas mengemukakan tujuan negara sebab yang terpenting baginya ialah tentang kekuasaan. Menurut Machiavelli, kekuasaan itu bukan alat yang mengabdikan pada kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan, dan Tuhan, melainkan alat yang harus mengabdikan pada kepentingan negara itu sendiri. Oleh karena negara hanya memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, maka kekuasaan pun harus lepas total dari etika, budaya, dan agama.

2. Konsep Nrgara Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani yakni *demos* dan *cratein*. *Demos* berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *domos-cratos* atau *demos-cratein* (demokrasi) dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Secara lebih sederhana, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah dijalankan oleh masyarakat polis Atena pada zaman Yunani Kuno. Polis Atena sendiri merupakan salah satu negara kota pada masa Yunani Kuno yang menjalankan sistem pemerintahan berbasis suara mayoritas. Setiap persoalan maupun kebijakan yang dibuat ditentukan berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Sistem pemerintahan yang demikian telah menggambarkan situasi demokrasi pada masa Yunani Kuno. Meskipun demikian, sistem pemerintahan berbasis suara mayoritas ini kemudian hilang karena surutnya peradaban Yunani Kuno. Baru setelah periode renesance, tradisi Yunani Kuno dilahirkan kembali dan sistem pemerintahan demokrasi turut ambil bagian di dalamnya. Para filsuf dan

pemikir Eropa mulai memberikan perhatian terhadap pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dan demokrasi dianggap sebagai ilham bagi para filsuf dan pemikir Eropa. Kemudian pemikiran tentang demokrasi dan penerapannya baru mendapat bentuknya pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20.

Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri yang berdasar dan salah satu ciri penentu demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana khalayak warga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik. Hal ini berarti bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang para pemimpinnya dipilih dalam proses kompetisi multi-partai dan multi-kandidat. Setiap perwakilan rakyat yang ada dalam parlemen diberi tanggung jawab yang besar untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan dan kekuasaan serta menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara agar dihormati dan dihargai. Dengan kata lain, para wakil rakyat harus menjamin hak-hak sipil dan politik formal masyarakat. Mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memenangkan mereka dalam sebuah kontestasi politik untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan ini.

3. Situasi Politik Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang telah menganut konsep demokrasi modern. Dalam sejarah perkembangannya, negara Indonesia telah menganut beberapa sistem demokrasi yang berbeda-beda sejak tahun 1945 hingga sekarang. Beberapa sistem demokrasi yang pernah dianut oleh negara ini ialah sistem demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila yang digunakan sampai saat ini. Zainal Arifin Mothar, seorang cendekiawan di era 70-an mengatakan bahwa dalam politik ada idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Namun situasi politik Indonesia saat ini menunjukkan bahwa antara idealitas dan realitas belum mendapatkan titik temu. Idealitas sebuah negara demokrasi masih sangat jauh dari kenyataan yang dipraktekkan. Contoh konkret praktek demokrasi yang masih jauh dari idealitasnya ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan. Undang-undang tersebut dianggap telah membatasi kebebasan publik untuk berekspresi membangun kritikan yang rasional dan efektif demi penyempurnaan sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Dalam negara demokrasi, publik semestinya mendapat kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, sebab dalam upaya membangun sebuah bangsa tidak cukup bila hanya dengan wujud kokoh infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal yang lebih penting dari itu ialah adanya ruang ekspresi di ruang publik dengan membangun literasi bangsa untuk menguatkan bangunan kebangsaan dengan pengetahuan dan kebudayaan. Namun faktanya bahwa gagasan tak lagi mendapat ruang karena telah diganti dengan kepentingan. Kebenaran sebuah negara demokrasi masih sedang diperjuangkan.

Selain undang-undang ITE, adapun skandal lain yang mencedraai sistem demokrasi di Indonesia. Skandal itu misalnya perubahan undang-undang yang mengatur tentang batas usia minimum seorang calon wakil presiden, penggunaan hak presiden untuk memihak salah satu calon dan berkampanye demi kepentingan salah satu capres dan cawapres dengan menggunakan fasilitas negara (Bantuan Sosial). Belum lagi, kebijakan yang diambil untuk mengubah konstitusi negara dibuat secara mendadak. Masyarakat seakan diabaikan dan bahkan tidak dipedulikan sama sekali. Perilaku penguasa yang demikian telah menunjukkan praktik demokrasi yang tidak saja keliru tetapi juga menyimpang. Penyimpangan ini dibuat secara sadar dan dengan intensi kesengajaan demi meloloskan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Skandal demokrasi seperti yang digambarkan di atas merupakan gambaran sikap penguasa yang sewenang-wenang. Dalam otaknya terkesan ada tirani yang telah terbentuk jauh sebelum kekuasaan itu menjadi milik pribadi. Praktik kekuasaan yang demikian dapat digolongkan sebagai praktik kekuasaan model Machiavellian. Menurut J. H. Rapar, Machiavellian adalah istilah yang digunakan untuk menuding seorang pembicara atau penulis politik yang berani mengetengahkan pandangan-pandangannya yang dinilai tak mengindahkan kaidah-kaidah kesusilaan. Selain itu, Machiavellian juga sering digunakan untuk menyebutkan tindakan politik yang tak bermoral demi mencapai tujuan-tujuan tertentu bagi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Praktik kepemimpinan yang demikian telah nampak dalam diri Presiden Joko Widodo.

4. Etika sebagai Tolak Ukur Idealitas Pemimpin dalam Negara Demokrasi

Term ideal sesungguhnya bersifat ambigu. Di satu sisi ia dapat berarti suatu sistem yang berada terpisah dari kondisi empiris tertentu. Sementara di sisi lain term ideal bisa dihubungkan dengan aspek moralitas. Sesuatu dikatakan ideal bila memenuhi tuntutan-tuntutan moralitas dan etika. Pada bagian ini, term ideal lebih dihubungkan dengan aspek-aspek moralitas dan etika sebagai upaya untuk menemukan model pemimpin yang diharapkan.

Sebagai seorang pemimpin dalam negara demokrasi, nilai-nilai etis mesti dihidupi mengingat ada orang lain di luar dirinya (rakyat) yang memerlukan bantuan dan dukungannya untuk bias hidup baik dan sejahtera. Terhadap keharusan tersebut, dalam urusan kepemimpinan ada istilah etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai sejumlah sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin dalam mengurus atau mengatur sebuah organisasi atau institusi agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan norma dan nilai etis yang berlaku. Adapun sifat-sifat utama seorang pemimpin, yakni cerdas, dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, inisiatif tinggi, dan rela berkorban. Sifat-sifat tersebut mesti menjadi standard moral bagi seorang pemimpin yang demokratis.

Untuk mengukur idealitas seorang pemimpin dalam Negara demokrasi, pertamanya mesti dilihat terlebih dahulu prinsip-prinsip dalam etika kepemimpinan. Ada lima prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil (fairness), terbuka (transparency), tanggung jawab (responsibility), efisiensi (efficiency), dan tidak ada kepentingan individu (no conflict of interest). Selain prinsip-prinsip tersebut, adapun syarat-syarat tertentu agar etika kepemimpinan dapat terwujud. Pertama, pemimpin memiliki sifat jujur kepada rakyatnya; kedua, memiliki hubungan positif dengan rakyatnya; ketiga, terbuka terhadap saran dan kritikan dari rakyat; keempat, mampu melihat dan menilai kinerja para anggotanya; kelima, bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan; keenam, memiliki sifat yang adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan prinsip dan syarat di atas, maka eksistensi seorang pemimpin dalam negara demokrasi tergantung pada upayanya untuk mengayomi, figur yang dapat dijadikan panutan, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak. Hal-hal praktis tersebut dianggap mampu melahirkan seorang pemimpin yang ideal bagi kalangan rakyat yang demokratis karena di dalamnya ada aspek penghargaan terhadap kemanusiaan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, setiap kebijakan atau pun putusan pemimpin mesti berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi problem perubahan konstitusi sebagaimana dilakukan oleh Joko Widodo dan Anwar Usman menjelang pemilu 2024,

pemberlakuan undang-undang ITE, penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye, fenomena pencitraan melalui bantuan sosial tidak semestinya terjadi karena tidak sesuai dengan prinsip dan syarat seorang pemimpin yang demokratis. Kebijakan-kebijakan tersebut secara konstitusional tidak salah, tetapi dari sudut pandang etis tidak bisa dibenarkan sebab kebijakan tersebut telah merusak esensi sebuah negara demokrasi. Rakyat yang seharusnya bebas berekspresi dan menyatakan pendapatnya di ruang publik dibatasi oleh undang-undang ITE, hukum yang seharusnya dibuat dengan prosedural yang tepat dilakukan secara mendadak dan non transparan, serta masih banyak lagi. Problem ini dilihat sebagai bentuk skandal terhadap demokrasi.

Jika dibandingkan dengan model kepemimpinan Machievellian, tindakan Presiden Joko Widodo mungkin saja benar karena seorang pemimpin tidak perlu menerima pertimbangan rakyat apakah kebijakannya itu baik atau buruk asalkan mendukung eksistensi negara. Namun persoalannya adalah bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sehingga tindakan seorang pemimpinnya mesti bertitik tolak pada prinsip-prinsip demokratis di mana aspek moralitas, etika, dan nalar tidak boleh diabaikan.

Sadar atau tidak, sikap pemimpin yang mengabaikan aspek moralitas, etika, dan nalar hanya akan membuat keadaban publik semakin ambruk. Sementara dalam negara demokrasi keadaban publik menjadi fondasi bangsa yang mampu menciptakan kemajuan dan kesejahteraan. Tanpanya negara ini akan terperangkap dalam idealisme tanpa realisme. Konsep ini sejalan dengan apa yang digagas oleh Yanuar Nugroho bahwa moralitas, etika, dan nalar merupakan asas hidup bersama dan menjadi muara serta daya hidup gerakan manusia Indonesia. Tanpa ketiganya, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera hanyalah sebuah ilusi.

Etika dan moralitas sendiri tidak akan eksis bila manusia tidak memiliki kepekaan sosial. Kepekaan itu lahir dari suara hati yang terus mendorongnya untuk berbuat baik, bertanggung jawab, dan berelasi. Hanya karena relasi antar pribadi atau antar kelompoklah yang memungkinkan nilai-nilai etis dan moral itu memiliki ruang yang cukup. Etika dan moralitas yang eksis karena kesadaran hati nurani untuk peka terhadap situasi sosial masyarakat tentunya berakar pada keyakinan atau kepercayaan seorang pribadi manusia akan suatu entitas yang lebih tinggi yang diketahuinya melalui agama dan kebudayaan yang dianut. Agama diakui sebagai kontrol moral. Dengan kata lain, agama dan budaya menjadi basis seseorang bisa bersikap atau bertindak dengan pertimbangan etika dan moralitas. Karena agama dan budaya dapat dilihat sebagai basis moralitas dan etika, tidak heran jika keduanya dipandang sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika.

Agama dan etika memiliki hubungan yang sangat erat. Etika berada dalam agama dan begitu pula sebaliknya. Lebih lanjut, agama merupakan salah satu norma yang ada dalam etika. Karena itu, kehadiran agama dan etika dalam hidup seorang pribadi menjadi tuntutan yang mutlak agar manusia dapat hidup secara baik dalam lingkungannya dan dalam relasinya dengan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka model pemimpin ideal menurut penulis dalam sebuah negara demokrasi adalah mereka yang memiliki keyakinan akan agama dan budaya. Argumentasi demikian bisa muncul karena keyakinan tersebut turut mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ia tak akan pernah sekali-kali mengabaikan aspek-aspek etika dan moralitas. Budaya misalnya dapat membantu seorang pemimpin untuk mengingat masa lalunya yang kelam yang penuh dengan perilaku buruk dan jahat

sehingga ingatan itu membuatnya belajar untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Nilai-nilai etis yang ada dalam budaya dapat membantu mengingatkan seseorang untuk berbenah diri menjadi yang lebih baik dari perilakunya yang buruk.

Selain budaya, agama pun menjadi faktor penting penentu perilaku seseorang. Jan Hendrik Raper misalnya pernah mengatakan bahwa dasar dan sumber moralitas di mana manusia dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk adalah Tuhan. Tuhan hanya bisa dikenal dan diketahui oleh manusia yang beragama. Dengan demikian, seorang pemimpin yang cenderung mengabaikan agama atau bahkan ingin memisahkannya dari urusan pemerintahan hampir pasti ia akan mengabaikan aspek moralitas dan etika. Pemimpin demikian akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan menganggap aspek kemanusiaan menjadi hal yang mesti diabaikan karena menjadi penghalang tujuan yang ingin dicapai.

Pemimpin yang punya keyakinan terhadap agama dan budaya hampir pasti tidak akan memisahkan agama dari negara karena baginya sekalipun keduanya merupakan institusi yang berbeda tetapi toh saling membutuhkan. Di sini kemungkinan upaya sekularisasi menjadi mustahil, sebab sekularisasi hanya akan membuat setiap kebijakan bersandar pada kepentingan dan tujuan bukan proses dan kemanusiaan. Pemimpin yang bertindak juga dengan pertimbangan baik-buruk akan terlihat transparan atau terbuka terhadap rakyatnya dan anggota pemerintahan lainnya.

Meskipun paham sekularisme ditolak, bukan berarti penulis menyarankan bentuk negara teokrasi di mana kekuasaan ada pada Tuhan. Maksud penolakan terhadap paham sekularisme hanya ingin agar aspek moralitas dan etika di mana agama menjadi salah satu sumbernya tidak diabaikan. Agama mesti diakui dan menjadi bagian dari negara agar ia mampu menggerakkan hati nurani manusia untuk semakin sadar akan pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk.

Seorang teolog-apologet, Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa tanpa iman, kita tidak bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Melalui keimanan seseorang dapat mengetahui secara benar apa itu kebaikan dan apa itu keadilan. Hal ini amat jelas tergambar dalam diri seorang yang beragama di mana pengetahuan itu diperoleh melalui kitab suci agamanya yang mengajarkan tentang hal-hal baik dan buruk dari tindakan manusia. Pascal berargumen bahwa Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa memiliki otoritas untuk menjalankan kehidupan secara baik sehingga sikap patuh terhadap moralitas yang dibangun berdasarkan keimanan dan agama merupakan bentuk yang paling sempurna untuk berbuat baik.

Berdasarkan uraian di atas, sekali lagi dipertegas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal dalam sebuah negara demokrasi, seorang pribadi mesti menyelaraskan kehidupan bernegara dan beragama. Kehidupan bernegara membantu seorang pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan secara baik menurut konstitusi. Sementara kehidupan beragama membantu seorang pemimpin untuk mengontrol perilaku dan tindakannya dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Kebijakan dan keputusan yang dibuat tidak saja berdasarkan pertimbangan benar-salah, tetapi juga baik-buruk secara tidak langsung telah menunjukkan keberpihakan seorang pemimpin pada aspek kemanusiaan. Ahmad Zadzali dalam bukunya *Relasi antara Agama dan Negara*, mengatakan bahwa manusia yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan menjalani hidup untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, niscaya ia akan menerima agama dan negara dengan lapang dada, dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Tetapi bagi manusia yang tidak ingin mencapai kualitas dan martabat hidup, tentu ia akan mengabaikan rambu-rambu agama dan negara.

KESIMPULAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat menjadi sentral setiap kebijakan dan putusan yang dibuat. Meskipun demikian, Indonesia sebagai Negara demokrasi masih jauh dari idealismenya. Ada kesenjangan yang begitu jauh antara idealisme dan realisme sebuah negara demokrasi. Undang-undang dan hukum dilanggar begitu saja tanpa mendapat sanksi dari pihak yang berwenang. Rakyat yang seharusnya punya kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya di ruang publik malah dibatasi oleh undang-undang dan hukum. Kebijakan yang mesti dibuat atas dasar kesepakatan bersama malah diputuskan sepihak dan tidak transparan. Demokrasi menjadi tidak sehat dan gema kehancuran sudah di ambang pintu. Fenomena tersebut telah menunjukkan adanya praktek penguasa yang otoriter dan individualis. Nilai-nilai etis dan moralitas diabaikan begitu saja demi tujuan dan kepentingan individual. Tidak ada penghargaan terhadap orang lain (rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi) dan menganggap diri sebagai satu-satunya orang yang bisa mewujudkan tujuan dan kepentingan negara tanpa bantuan dari pihak lain. Tidak heran jika praktek politik di Indonesia dianggap sebagai praktek politik machevellian di mana hukum dan rakyat tidak perlu dihiraukan dalam mengambil sebuah kebijakan publik.

Sebagai Negara demokrasi, rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang demokratis dalam artian ia mesti memegang prinsip-prinsip dan syarat-syarat sebuah negara demokrasi. Ia harus memiliki sikap etis yang baik, cerdas, bertanggung jawab, jujur, transparan, rendah hati, dan tidak ada kecenderungan individual untuk merepresentasikan diri sebagai penguasa. Keberpihakannya kepada rakyat menjadi tuntutan mutlak yang tidak bisa didiskusikan lagi. Ia mesti menunjukkan kualitas dirinya dengan jalan menginternalisasi nilai-nilai etis dan moralitas ke dalam dirinya agar tindakannya dan perilakunya tidak terlepas dari penghargaannya terhadap aspek kemanusiaan. Karena etika dan moralitas bersumber dari agama dan budaya maka pemimpin haruslah seorang yang beragama dan berbudaya. Dengan demikian, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa model pemimpin ideal dalam sebuah negara demokrasi adalah mereka yang beragama dan berbudaya karena agama dan budaya diyakini menjadi penentu setiap tindakan dan perilaku manusia (pemimpin). Agama dan budaya sebagai sumber nilai-nilai etis dan moral dapat membentuk pemimpin yang beretika, berintegritas, dan solider dengan orang lain (rakyat). Karena itu, kehidupan bernegara perlu diselaraskan dengan kehidupan beragama dan berbudaya. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan rakyat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Dhani, 'Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya', *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8:1 (2016), 94–111
<<https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>>
- Kurniawan, Luthfi J., *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan Merawat Kewarasan* (Malang: Intrans Publishing, 2021)
- Machiavelli, Niccolo, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*, ed. by C. Woekirsari (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- "Rusaknya Kabinet Jokowi [t. p.]", *MAJALAH TEMPO* (4 Februari 2024)
- Maulana, Ilham, 'Pertaruhan Keimanan Pascal Dan Dampaknya Pada Perilaku Beragama', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 13–27
<<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-02>>

- Mayer, Frederick, *A History of Modern Philosophy* (Amerika: American Book Company, 1951)
- Mufid, Muhammad, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009)
- Nizar, Nizar, 'Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial', *Jurnal Arajang*, 1:1 (Sulawesi Barat: November 2017)
- Noviati, Cora Elly, 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10:2 (Jakarta: Mei 2016)
- Nugroho, Iwan, 'Mengembangkan Etika Kepemimpinan Pada Jabatan Publik', *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4:4 (Malang: 2013)
- Nugroho, Yanuar, 'Ambruknya Keadaban Publik Kita', *Kompas*, 2024, p. 7
- Pakpahan, Binsar J, 'Etika Mengingat Bagi Bangsa Pelupa 1', 27
- Rapar, J. H., *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*, Edisi Gabu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Raper, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999)
- Regus, Max, *REPUBLIK SIALAN: Memburu Kejernihan Di Tengan Belantara Kerancuan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003)
- Sadzali, Ahmad, 'Relasi Agama', 2016, 310
- Sihombing, Salim Ahmadi, '267167061-Etika-Kepemimpinan', 2015, p. 2
<<https://www.scribd.com/document/267167061/Etika-kepemimpinan>>
- Sukriono, Didik, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 2 no. 1, 15
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa Dan Moral* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1986)